

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Kemiskinan saat ini masih menjadi salah satu masalah utama dalam pembangunan ekonomi di Indonesia (Lestari et al., 2023). Pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk menekan jumlah penduduk miskin, mulai dari program bantuan sosial, peningkatan infrastruktur, sampai pemberdayaan ekonomi masyarakat. Namun, permasalahan kemiskinan tidak bisa selesai dalam waktu singkat karena penyebabnya saling berkaitan dan kompleks. Meskipun dalam beberapa tahun terakhir angka kemiskinan menunjukkan tren menurun, penurunannya belum merata di semua wilayah. Kondisi ini menandakan bahwa kesejahteraan masyarakat masih menghadapi tantang besar di berbagai daerah (Sarjito, 2023).

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Jawa Timur (2025), tingkat kemiskinan Indonesia pada September 2024 tercatat sebesar 8,57 persen. Angka ini memang menurun dibandingkan tahun sebelumnya, tetapi masih menunjukkan kesenjangan antara daerah perkotaan dan perdesaan. Di wilayah perkotaan, tingkat kemiskinan sebesar 6,66 persen, sedangkan di perdesaan mencapai 11,34 persen. Perbedaan ini memperlihatkan bahwa hasil pembangunan belum sepenuhnya dirasakan oleh seluruh masyarakat, termasuk mereka yang bertempat di pedesaan. Dengan kata lain, pertumbuhan ekonomi nasional belum sepenuhnya bersifat inklusif karena manfaatnya belum dirasakan secara merata.

Kondisi nasional tersebut juga tercermin di Provinsi Jawa Timur, salah satu provinsi dengan kontribusi besar terhadap perekonomian nasional. Meskipun pertumbuhan ekonomi Jawa Timur pada tahun 2024 mencapai sekitar 4,93 persen, tingkat kemiskinan masih berada di kisaran 9,56 persen (BPS Jawa Timur, 2025). Angka ini lebih tinggi dibandingkan rata-rata nasional. Ketimpangan pendapatan di provinsi ini juga tergolong sedang, dengan nilai gini ratio sebesar 0,373. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun perekonomian Jawa Timur tumbuh cukup baik, pemerataan hasil pembangunan belum sepenuhnya tercapai. Beberapa daerah seperti Surabaya dan Sidoarjo mengalami kemajuan pesat, sementara wilayah barat seperti Bojonegoro dan Tuban masih menghadapi tantangan kesejahteraan.

Sejalan dengan hasil penelitian Mustika (2022) yang menyebutkan bahwa ketimpangan pendapatan di perdesaan lebih berpengaruh terhadap kemiskinan dibandingkan di perkotaan. Hal ini karena masyarakat desa masih menghadapi keterbatasan akses terhadap pendidikan, pekerjaan, dan infrastruktur ekonomi. Artinya, pertumbuhan ekonomi yang terjadi belum sepenuhnya inklusif. Oleh karena itu, dibutuhkan kebijakan pembangunan yang tidak hanya mengejar pertumbuhan angka ekonomi, tapi juga memperhatikan pemerataan hasilnya agar kesejahteraan bisa dirasakan secara menyeluruh.

Kondisi ini dapat dijelaskan melalui hipotesis Kuznets yang menyatakan bahwa pada tahap awal pembangunan, pertumbuhan ekonomi cenderung meningkatkan ketimpangan pendapatan karena sebagian kecil masyarakat lebih dulu menikmati hasil pembangunan (Zaremba, 2024). Namun, seiring waktu

ketimpangan akan menurun ketika manfaat pertumbuhan mulai dirasakan lebih luas (Matondang et al., 2019). Dalam konteks daerah, teori ini relevan untuk menjelaskan mengapa sebagian wilayah di Jawa Timur berkembang lebih cepat daripada yang lainnya.

Salah satu daerah yang menarik untuk dikaji lebih dalam adalah Kabupaten Bojonegoro. Daerah ini mengalami pertumbuhan ekonomi yang cukup pesat dalam beberapa tahun terakhir. Namun, di sisi lain, ketimpangan pendapatan dan tingkat kemiskinan masih menjadi permasalahan yang menonjol. Kondisi ini memperlihatkan bahwa peningkatan aktivitas ekonomi di Bojonegoro belum sepenuhnya memberikan dampak yang merata bagi seluruh masyarakat (Rakhmawan & Aji, 2022). Oleh karena itu, penting untuk meneliti lebih lanjut bagaimana hubungan antara pertumbuhan ekonomi, ketimpangan pendapatan, dan kemiskinan di Kabupaten Bojonegoro agar dapat menjadi bahan pertimbangan dalam kebijakan pembangunan daerah ke depan.

Untuk menggambarkan lebih jauh dinamika ketimpangan pendapatan di Kabupaten Bojonegoro, disajikan data Gini Ratio selama periode 2008–2024. Data ini menunjukkan perkembangan tingkat pemerataan pendapatan dari waktu ke waktu, sehingga dapat memberikan gambaran mengenai stabilitas maupun fluktuasi distribusi pendapatan masyarakat. Melalui penyajian data tersebut, diharapkan dapat diketahui kecenderungan perubahan ketimpangan pendapatan dan implikasinya terhadap kondisi sosial ekonomi daerah serta menjadi dasar penting dalam menganalisis keterkaitan antara ketimpangan pendapatan, pertumbuhan ekonomi, dan tingkat kemiskinan di Kabupaten Bojonegoro.

Tabel 1. 1 Gini Ratio Kabupaten Bojonegoro Tahun 2008-2024

Tahun	Gini Ratio
2008	0,24
2009	0,26
2010	0,28
2011	0,27
2012	0,31
2013	0,32
2014	0,28
2015	0,32
2016	0,32
2017	0,29
2018	0,348
2019	0,309
2020	0,303
2021	0,34
2022	0,28
2023	0,283
2024	0,31

Sumber: Badan Pusat Statistik Bojonegoro (2025)

Berdasarkan data pada Tabel 1.1, tingkat ketimpangan pendapatan di Kabupaten Bojonegoro yang diukur melalui Gini Ratio menunjukkan kecenderungan yang berfluktuasi selama periode 2008–2024. Pada awal periode, nilai Gini Ratio relatif rendah yaitu 0,24 pada 2008, menandakan tingkat ketimpangan yang masih kecil. Namun, memasuki tahun-tahun berikutnya, nilai ini terus meningkat hingga mencapai 0,32 pada 2015, dan sempat mencapai puncaknya pada 0,34 di tahun 2021. Kenaikan tersebut menunjukkan bahwa distribusi pendapatan antar kelompok masyarakat mulai melebar. Meskipun pada tahun-tahun terakhir nilainya menurun kembali menjadi 0,31 pada 2024, kondisi tersebut masih tergolong dalam kategori ketimpangan sedang.

Perubahan nilai Gini Ratio ini tidak terjadi secara acak, melainkan sejalan dengan dinamika struktur ekonomi Bojonegoro. Badan Pusat Statistik (2021) pada periode 2008–2014, pertumbuhan ekonomi masih ditopang oleh sektor pertanian dan perdagangan, dengan kontribusi yang cukup besar terhadap serapan tenaga kerja. Ketika struktur ekonomi mulai bergeser dan aktivitas ekonomi meningkat di wilayah perkotaan, peluang ekonomi menjadi tidak merata. Masyarakat dengan akses modal, pendidikan, dan jaringan ekonomi yang lebih baik lebih cepat menyesuaikan diri terhadap perubahan pasar, sementara kelompok masyarakat di pedesaan tertinggal. Akibatnya, meskipun perekonomian tumbuh, jarak kesejahteraan antar lapisan masyarakat melebar.

Berdasarkan Badan Pusat Statistik (2025) kondisi ketimpangan ini semakin jelas terlihat pada periode 2018–2021. Lonjakan nilai Gini Ratio pada dua tahun tersebut menunjukkan adanya tekanan terhadap distribusi pendapatan yang lebih tidak seimbang. Salah satu penyebabnya adalah pergeseran sumber pertumbuhan ekonomi yang semakin didominasi oleh sektor-sektor padat modal, sementara sektor padat karya yang banyak menyerap tenaga kerja justru melambat. Ketika pandemi COVID-19 terjadi pada 2020–2021, ketimpangan sosial ekonomi semakin menguat. Kelompok pekerja informal dan masyarakat berpenghasilan rendah mengalami penurunan pendapatan yang drastis, sedangkan sebagian kecil kelompok ekonomi menengah tetap bertahan melalui sektor usaha yang lebih fleksibel.

Berdasarkan uraian tersebut, untuk melihat secara lebih jelas perkembangan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Bojonegoro, penelitian ini menggunakan

indikator Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan (ADHK). PDRB ADHK digunakan karena mampu mencerminkan pertumbuhan ekonomi riil yang telah disesuaikan dengan perubahan harga, sehingga dapat menggambarkan kondisi perekonomian daerah yang sebenarnya dari waktu ke waktu.

Adapun perkembangan PDRB ADHK Kabupaten Bojonegoro disajikan pada tabel berikut.

Tabel 1. 2 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) Kabupaten Bojonegoro Tahun 2008-2024

Tahun	PDRB ADHK (%)
2008	6,89
2009	7,11
2010	7,48
2011	6,06
2012	7,24
2013	7,13
2014	5,47
2015	1,06
2016	2,04
2017	1,74
2018	2,04
2019	2,23
2020	-0,4
2021	-5,54
2022	-6,16
2023	2,47
2024	1,67

Sumber: Badan Pusat Statistik Bojonegoro (2025)

Pada Tabel 1.2, berdasarkan BPS (2025) pertumbuhan ekonomi Bojonegoro memperlihatkan pola yang tidak stabil dari tahun ke tahun. Setelah tumbuh tinggi di kisaran 6–7 persen pada 2008–2013, laju pertumbuhan menurun tajam menjadi hanya 1,06 persen pada 2015. Penurunan ini menunjukkan adanya

perlambatan aktivitas ekonomi, yang salah satunya disebabkan oleh transisi dari ketergantungan migas ke penguatan sektor non-migas. Upaya diversifikasi ekonomi ini membutuhkan waktu karena sektor-sektor pengganti seperti pertanian, industri pengolahan, dan jasa masih dalam tahap penyesuaian.

Memasuki periode 2016–2019, pertumbuhan ekonomi mulai membaik meskipun tidak setinggi sebelumnya. Stabilitas ekonomi relatif terjaga di kisaran 2–2,5 persen per tahun. Namun, situasi berubah drastis pada masa pandemi COVID-19. Data menunjukkan bahwa pada tahun 2020 pertumbuhan ekonomi Bojonegoro turun hingga -0,40 persen, lalu berkontraksi lebih dalam menjadi -5,54 persen pada 2021. Pandemi menyebabkan penurunan permintaan agregat, terganggunya rantai pasok, dan berkurangnya aktivitas sektor jasa serta perdagangan. Baru pada 2023–2024 ekonomi daerah mulai kembali tumbuh positif meskipun belum stabil, dengan angka 1,67 persen pada 2024 (BPS, 2025).

Setelah membahas perkembangan ketimpangan pendapatan dan pertumbuhan ekonomi, selanjutnya perlu dianalisis kondisi tingkat kemiskinan. Analisis terhadap tingkat kemiskinan penting dilakukan untuk mengetahui sejauh mana hasil pembangunan dapat dirasakan secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat. Oleh karena itu, Tabel 1.3 berikut menyajikan data tingkat kemiskinan Kabupaten Bojonegoro Tahun 2008–2024 sebagai dasar untuk melihat perubahan kondisi sosial ekonomi masyarakat dari waktu ke waktu.

Tabel 1. 3 Tingkat Kemiskinan Kabupaten Bojonegoro Tahun 2008-2024

Tahun	Kemiskinan (%)
2008	23,87
2009	21,27
2010	18,78
2011	14,47
2012	16,66
2013	16,02
2014	15,48
2015	15,71
2016	14,6
2017	14,34
2018	13,16
2019	12,38
2020	12,87
2021	13,27
2022	12,21
2023	12,18
2024	11,69

Sumber: Badan Pusat Statistik Bojonegoro (2025)

Berdasarkan data pada Tabel 1.3, tingkat kemiskinan di Bojonegoro menunjukkan arah perbaikan yang lebih konsisten dibanding dua variabel lainnya. Pada 2008, proporsi penduduk miskin mencapai 23,87 persen, angka yang cukup tinggi dibandingkan rata-rata provinsi. Namun, selama 17 tahun terakhir, angka tersebut terus menurun hingga 11,69 persen pada 2024. Penurunan ini menandakan adanya kemajuan nyata dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat. Meski demikian, jika dicermati lebih dalam, penurunan kemiskinan ini tidak selalu berjalan beriringan dengan pemerataan pendapatan. Ada fase di mana kemiskinan turun, tetapi ketimpangan justru meningkat, seperti pada periode 2018–2021. Hal ini menunjukkan bahwa

penurunan kemiskinan tidak sepenuhnya diikuti oleh perbaikan distribusi pendapatan (BPS, 2025).

Kondisi tersebut mencerminkan karakter pembangunan yang masih belum sepenuhnya inklusif. Pertumbuhan ekonomi memang berhasil menekan angka kemiskinan secara agregat, tetapi belum menyentuh seluruh lapisan masyarakat secara merata (Haya et al., 2022). Sektor-sektor produktif masih didominasi oleh pelaku usaha besar, sedangkan kelompok kecil dan menengah menghadapi keterbatasan modal, akses pasar, dan teknologi. Ketika penduduk bekerja di sektor pertanian dengan produktivitas rendah, peningkatan pendapatan menjadi lambat, sehingga ketimpangan sulit ditekan (Hababil et al., 2024).

Kondisi ini juga memperlihatkan adanya hubungan yang tidak selalu linier antara pertumbuhan ekonomi, ketimpangan, dan kemiskinan. Dalam teori ekonomi pembangunan, hubungan ketiganya sering kali dijelaskan melalui konsep *trickle-down effect*, yang berasumsi bahwa manfaat pertumbuhan akan menetes ke bawah dan mengurangi kemiskinan. Namun, dalam kenyataan, efek tersebut tidak otomatis terjadi, terutama jika struktur ekonomi daerah masih timpang (Jati et al., 2023). Bojonegoro menjadi contoh konkret bahwa pertumbuhan ekonomi yang tidak merata justru ini memperlebar kesenjangan sosial, meskipun angka kemiskinan secara umum menurun.

Secara konseptual, hubungan antara pertumbuhan ekonomi, ketimpangan pendapatan, dan kemiskinan telah menjadi perhatian utama para ekonom sejak lama. Teori pertumbuhan ekonomi klasik seperti model Harrod-Domar menekankan pentingnya investasi dalam mendorong pertumbuhan output dan

peningkatan pendapatan nasional. Model ini mengasumsikan bahwa semakin tinggi tingkat tabungan dan investasi, semakin cepat pula laju pertumbuhan ekonomi suatu negara (Dewi et al., 2021). Namun, teori ini belum mempertimbangkan aspek distribusi hasil pembangunan. Dalam perkembangan berikutnya, menggarisbawahi bahwa pertumbuhan ekonomi jangka panjang dipengaruhi oleh akumulasi modal, pertumbuhan tenaga kerja, dan kemajuan teknologi akan tetapi teori juga mengasumsikan pemerataan otomatis seiring meningkatnya output padahal dalam kenyataannya tidak selalu demikian (Auxiliadora et al., 2024).

Keterbatasan teori-teori tersebut kemudian dijelaskan melalui hipotesis Kuznets dengan konsep Kuznets Curve menyatakan bahwa pada tahap awal pembangunan ekonomi, ketimpangan pendapatan cenderung meningkat karena sebagian kecil masyarakat menikmati keuntungan pertumbuhan terlebih dahulu. Namun, seiring dengan meningkatnya taraf pembangunan dan meluasnya kesempatan ekonomi, ketimpangan tersebut akan menurun. Pola ini membentuk “U terbalik” yang menjelaskan dinamika hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan distribusi pendapatan (Zaremba, 2024). Dalam konteks daerah seperti Kabupaten Bojonegoro, kondisi ini relevan karena pertumbuhan ekonomi yang terjadi belum sepenuhnya inklusif. Masih ada kelompok masyarakat yang belum mendapatkan manfaat optimal dari peningkatan aktivitas ekonomi daerah.

Menurut Todaro dan Smith (2020), pembangunan ekonomi seharusnya tidak hanya diukur dari peningkatan pendapatan per kapita melainkan dari sejauh

mana pembangunan tersebut mampu memperluas kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan, dan menekan ketimpangan sosial. Dengan demikian, keberhasilan pembangunan tidak hanya bergantung pada pertumbuhan ekonomi tapi juga pada pemerataan distribusi pendapatan di antara penduduk. Hal ini sejalan dengan pendekatan pembangunan inklusif yang menekankan partisipasi seluruh masyarakat dalam proses ekonomi. Di Bojonegoro, penurunan angka kemiskinan belum sepenuhnya diikuti dengan pemerataan pendapatan. Ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi daerah tersebut masih belum bersifat inklusif.

Penelitian terdahulu menunjukkan hasil yang tidak konsisten terkait hubungan antara pertumbuhan ekonomi, ketimpangan pendapatan, dan kemiskinan. Rahmawati (2020) menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif yang signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Timur, artinya peningkatan pertumbuhan ekonomi cenderung diikuti dengan penurunan angka kemiskinan. Namun, hasil berbeda ditunjukkan oleh Handoko (2021) yang menyatakan bahwa ketimpangan pendapatan dapat melemahkan hubungan negatif tersebut, meskipun ekonomi tumbuh, penurunan kemiskinan tidak dirasakan secara merata oleh seluruh masyarakat. Sementara itu, Lestari dan Santoso (2022) menyimpulkan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak memberikan pengaruh signifikan terhadap kemiskinan apabila tingkat ketimpangan pendapatan di suatu wilayah masih tergolong tinggi. Perbedaan hasil penelitian tersebut menyatakan bahwa hubungan antara ketimpangan pendapatan, pertumbuhan ekonomi, dan kemiskinan tidak selalu searah dan

bersifat kontekstual, bergantung pada karakteristik wilayah, struktur ekonomi, serta kondisi sosial masyarakat setempat. Oleh karena itu, diperlukan penelitian lebih lanjut yang menganalisis hubungan antarvariabel dan berbasis data jangka panjang di tingkat kabupaten, seperti yang dilakukan dalam penelitian ini di Kabupaten Bojonegoro.

Dalam konteks Bojonegoro, hasil penelitian yang berfokus secara spesifik pada hubungan antara ketimpangan pendapatan (Gini Ratio), pertumbuhan ekonomi, dan kemiskinan masih relatif terbatas. Penelitian sebelumnya lebih banyak menyoroti hubungan antar dua variabel secara terpisah, misalnya antara pertumbuhan ekonomi dengan kemiskinan atau ketimpangan pendapatan dengan kemiskinan (Aisyah et al., 2023). Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan penelitian yang perlu dijawab melalui pendekatan yang lebih komprehensif dan berbasis data jangka panjang. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan pendapatan terhadap kemiskinan di Kabupaten Bojonegoro selama periode 2008–2024.

Penelitian ini selaras dengan upaya pemerintah daerah yang terus berfokus pada penurunan angka kemiskinan dan pengurangan ketimpangan pendapatan di Kabupaten Bojonegoro. Pemerintah daerah terus berusaha memperkuat sektor-sektor produktif, seperti minyak dan gas, pertanian, dan perdagangan, guna mendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi. Namun, tantangan utama yang dihadapi terletak pada bagaimana memastikan manfaat pembangunan tersebut dapat dirasakan secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat (Dewi

et al., 2021). Dalam konteks tersebut, penelitian ini diharapkan dapat memberikan landasan empiris bagi pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan yang tidak hanya fokus pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pemerataan hasil pembangunan.

Data BPS (2025) memang menunjukkan tren positif dalam pengurangan jumlah penduduk miskin, namun Gini Ratio masih berfluktuasi cukup tinggi selama 2008–2024. Artinya, manfaat pertumbuhan ekonomi belum sepenuhnya inklusif. Ketimpangan ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain keterbatasan akses masyarakat terhadap sumber daya ekonomi, pendidikan, maupun peluang usaha, serta distribusi aset produktif seperti lahan dan modal yang belum merata (Ningrum et al., 2024). Sementara itu, dari sisi kebijakan, pertumbuhan ekonomi yang lebih terkonsentrasi pada sektor tertentu dapat membuat manfaat pembangunan hanya dirasakan oleh kelompok masyarakat tertentu

Berdasarkan kondisi tersebut, penting dilakukan penelitian yang mengkaji hubungan antara ketimpangan pendapatan, pertumbuhan ekonomi, dan kemiskinan di tingkat daerah. Penelitian ini mengisi kesenjangan tersebut dengan menganalisis dua variabel ekonomi utama, yaitu ketimpangan pendapatan (Gini Ratio) dan pertumbuhan ekonomi, terhadap kemiskinan di Kabupaten Bojonegoro menggunakan data *time series* selama 2008–2024. Sebagian besar penelitian sebelumnya dilakukan di tingkat provinsi atau nasional, sedangkan penelitian di tingkat kabupaten masih sangat terbatas (Dewi et al., 2021). Dengan menggunakan data *time series* selama tujuh belas

tahun 2008–2024, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam terkait dinamika sosial ekonomi di Bojonegoro dari waktu ke waktu.

Selain memperluas kajian empiris terkait pembangunan daerah, penelitian ini juga memberikan kontribusi praktis dengan menyediakan landasan ilmiah bagi perumusan kebijakan ekonomi yang lebih inklusif dan berkeadilan. Temuan penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi pemerintah daerah dalam merancang strategi pembangunan yang tidak hanya berfokus pada peningkatan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pada pemerataan hasil pembangunan di seluruh masyarakat (Putra & Lisna, 2020).

Penelitian ini berupaya memberikan bukti empiris baru mengenai sejauh mana pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Bojonegoro mampu menurunkan kemiskinan tanpa memperlebar ketimpangan pendapatan. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi pada dasarnya diharapkan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun, pertumbuhan tidak diiringi pemerataan justru berpotensi memperbesar kesenjangan sosial. Sebaliknya, apabila pemerataan pendapatan terjaga, maka pertumbuhan ekonomi akan memberikan dampak yang lebih inklusif terhadap pengurangan kemiskinan.

Dari sisi pendekatan dan objek kajian, penelitian ini memiliki beberapa keunikan empiris dibandingkan dengan penelitian sebelumnya. Pertama, penelitian ini berfokus pada analisis hubungan antara ketimpangan pendapatan, pertumbuhan ekonomi, dan kemiskinan di tingkat kabupaten. Sebagian besar penelitian terdahulu masih banyak dilakukan pada level provinsi atau nasional,

sehingga hubungan antarvariabel di tingkat kabupaten belum banyak dieksplorasi secara mendalam. Padahal, setiap daerah memiliki karakteristik ekonomi, struktur sosial, serta potensi sumber daya yang berbeda, sehingga dinamika hubungan ketiga variabel tersebut di tingkat lokal bisa menunjukkan pola yang unik. Kedua, penelitian ini menempatkan Kabupaten Bojonegoro sebagai objek kajian dengan karakteristik ekonomi yang khas.

Selama periode 2008–2024, Bojonegoro mengalami fluktuasi pertumbuhan ekonomi yang cukup tajam, terutama akibat perubahan harga komoditas migas dan kondisi sektor pertanian. Pada saat yang sama, tingkat ketimpangan pendapatan yang diukur melalui gini ratio juga menunjukkan tren yang tidak stabil, sementara tingkat kemiskinan tidak selalu menurun seiring meningkatnya pertumbuhan ekonomi. Hal ini menunjukkan bahwa hubungan antara pertumbuhan ekonomi, ketimpangan pendapatan, dan kemiskinan tidak selalu searah, sehingga diperlukan analisis empiris untuk memahami keterkaitannya secara lebih objektif. Ketiga, penelitian ini menggunakan data deret waktu (*time series*) selama 17 tahun, yaitu dari 2008 hingga 2024, untuk menggambarkan pola hubungan jangka panjang antara ketimpangan pendapatan, pertumbuhan ekonomi, dan kemiskinan di Kabupaten Bojonegoro.

Pemilihan rentang waktu tersebut didasarkan pada ketersediaan data resmi dari Badan Pusat Statistik (BPS), di mana data ketimpangan pendapatan di tingkat kabupaten baru tersedia mulai tahun 2008 dan hanya sampai tahun 2024. Meskipun periode penelitian terbatas pada 17 tahun, rentang waktu ini sudah cukup mewakili dinamika sosial ekonomi daerah dalam jangka panjang. Selain

itu, periode tersebut juga memungkinkan analisis terhadap pengaruh berbagai peristiwa penting terhadap ketimpangan pendapatan serta kemiskinan di daerah.

Selain memberikan kontribusi akademis, penelitian ini juga memiliki manfaat praktis, yaitu sebagai bahan pertimbangan bagi Pemerintah Kabupaten Bojonegoro dalam mengevaluasi sejauh mana pembangunan ekonomi daerah berjalan secara seimbang antara pertumbuhan dan pemerataan pendapatan. Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar dalam perumusan kebijakan pembangunan yang berorientasi pada pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan sosial di masa mendatang.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang, pertanyaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah terdapat hubungan antara ketimpangan pendapatan (Gini Ratio) dengan tingkat kemiskinan di Kabupaten Bojonegoro tahun 2008-2024?
2. Apakah terdapat hubungan antara pertumbuhan ekonomi dengan tingkat kemiskinan di Kabupaten Bojonegoro tahun 2008-2024?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan pertanyaan penelitian tersebut, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menganalisis hubungan antara ketimpangan pendapatan (Gini Ratio) dengan tingkat kemiskinan di Kabupaten Bojonegoro tahun 2008-2024
2. Menganalisis hubungan antara pertumbuhan ekonomi dengan tingkat kemiskinan di Kabupaten Bojonegoro tahun 2008-2024

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat, baik secara teoritis maupun praktis, sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperluas kajian empiris mengenai hubungan antara ketimpangan pendapatan, pertumbuhan ekonomi, dan kemiskinan pada tingkat daerah. Penelitian ini juga dapat menjadi referensi tambahan dalam pengembangan teori-teori ekonomi pembangunan, khususnya yang berkaitan dengan pemerataan hasil pembangunan dan pertumbuhan ekonomi yang inklusif.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Bojonegoro, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam merumuskan kebijakan ekonomi daerah yang lebih efektif dan berkeadilan, terutama dalam upaya menurunkan angka kemiskinan dan mengurangi ketimpangan pendapatan.
- b. Bagi akademisi dan peneliti selanjutnya, penelitian ini dapat menjadi dasar rujukan atau pembanding dalam melakukan penelitian serupa di wilayah lain dengan variabel dan periode waktu yang berbeda.
- c. Bagi masyarakat, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai pentingnya pertumbuhan ekonomi yang disertai pemerataan pendapatan dalam meningkatkan kesejahteraan bersama.

1.5 Batasan Penelitian

1. Penelitian ini fokus pada analisis hubungan antara ketimpangan pendapatan (Gini Ratio) dan pertumbuhan ekonomi terhadap tingkat kemiskinan di Kabupaten Bojonegoro.
2. Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder tahunan yang bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Bojonegoro dan publikasi resmi lainnya.
3. Periode penelitian ini dibatasi hanya pada periode tahun 2008 hingga 2024 untuk menjaga konsistensi dan ketersediaan data.
4. Analisis yang dilakukan bersifat kuantitatif deskriptif dan korelasional dengan tujuan untuk melihat sejauh mana hubungan antarvariabel tanpa menjelaskan sebab-akibat secara mendalam.